

POLITIK IDENTITAS DAN POLARITAS SOSIAL DI ERA MEDIA SOSIAL



RUDY C TARUMINGKENG

Rudy C Tarumingkeng: **Politik Identitas dan Polaritas Sosial
di Era Media Sosial**

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Guru Besar Manajemen, NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988)

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar IPB-University, Bogor (2005-2006)

Ketua Senat Akademik IBM-ASMI, Jakarta

© RUDYCT e-PRESS
rudyct75@gmail.com

Bogor, Indonesia

3 Agustus 2025

Berikut adalah narasi yang membahas secara mendalam topik "**Politik Identitas dan Polaritas Sosial di Era Media Sosial**":

Politik Identitas dan Polaritas Sosial di Era Media Sosial

Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, dunia telah menyaksikan pergeseran besar dalam cara masyarakat berkomunikasi, membentuk opini, dan berpolitik. Salah satu kekuatan utama di balik perubahan ini adalah kemunculan media sosial. Platform seperti Facebook, Twitter (sekarang X), Instagram, dan TikTok tidak hanya merevolusi cara orang terhubung, tetapi juga mengubah lanskap politik global. Di tengah revolusi ini, dua fenomena yang menonjol adalah politik identitas dan meningkatnya polaritas sosial.

Politik identitas mengacu pada kecenderungan individu atau kelompok untuk memobilisasi politik berdasarkan aspek identitas seperti agama, etnisitas, gender, orientasi seksual, atau afiliasi budaya. Sementara itu, polaritas sosial merujuk pada meningkatnya perpecahan, ketegangan, dan permusuhan antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Ketika keduanya bertemu dalam ruang yang sangat terpersonalisasi dan algoritmik seperti media sosial, hasilnya bisa sangat eksplosif.

Politik Identitas: Sebuah Pisau Bermata Dua

Politik identitas pada dasarnya bukanlah hal yang baru. Sejak zaman pergerakan hak-hak sipil, feminisme, dan perjuangan kemerdekaan di berbagai belahan dunia, identitas telah menjadi senjata perjuangan politik. Ia memungkinkan kelompok-kelompok yang termarginalkan untuk mengangkat suara, mengartikulasikan penderitaan kolektif, dan

menuntut keadilan. Dalam banyak kasus, politik identitas adalah alat pembebasan.

Namun, dalam konteks media sosial, politik identitas bisa berkembang menjadi eksklusif, menuntut loyalitas mutlak, dan menciptakan batas-batas yang kaku antara “kami” dan “mereka”. Ketika identitas menjadi satu-satunya lensa dalam melihat dunia, ia rentan terhadap penyederhanaan ekstrem dan stereotip. Alhasil, politik yang semula dimaksudkan untuk membebaskan bisa berubah menjadi mekanisme pengucilan.

Algoritma dan Efek Echo Chamber

Media sosial didesain untuk membuat pengguna bertahan selama mungkin di platform. Untuk itu, algoritma dirancang agar menyajikan konten yang selaras dengan preferensi pengguna. Akibatnya, pengguna cenderung terjebak dalam *echo chamber*—lingkungan digital di mana mereka hanya terpapar pandangan yang sejalan dengan miliknya.

Dalam konteks politik identitas, *echo chamber* memperkuat keyakinan kelompok dan memperbesar rasa antagonisme terhadap kelompok lain. Orang tidak lagi melihat lawan politik sebagai sesama warga negara yang berbeda pandangan, tetapi sebagai ancaman eksistensial. Hal ini berkontribusi langsung pada meningkatnya polarisasi.

Polarisasi Sosial: Menguatnya ‘Kita vs Mereka’

Polarisasi sosial menjadi ciri khas politik modern di banyak negara. Di Indonesia, misalnya, kontestasi politik seperti Pilpres 2014 dan 2019 memperlihatkan bagaimana masyarakat terbelah tajam antara dua kubu. Bukan hanya soal calon presiden yang didukung, tetapi lebih dalam menyangkut agama, etnis, bahkan integritas moral lawan politik.

Media sosial menjadi medan tempur utama dalam konflik ini. Meme, hoaks, dan ujaran kebencian menyebar dengan cepat, memperkuat stigma dan memperdalam perpecahan. Identitas kolektif dibentuk bukan

hanya berdasarkan kesamaan, tetapi juga berdasarkan siapa yang dibenci bersama. Narasi “kita yang benar” versus “mereka yang sesat” menjadi lazim.

Politik Emosional dan Disinformasi

Dalam ruang media sosial, konten yang paling emosional sering kali lebih efektif daripada argumen rasional. Isu-isu identitas sangat mudah memicu reaksi emosional, karena menyentuh aspek terdalam dari siapa seseorang itu. Dalam banyak kasus, kampanye politik dengan sengaja memainkan sentimen ini demi mendapatkan dukungan.

Lebih buruk lagi, disinformasi sering menjadi senjata utama. Informasi palsu yang menyasar kelompok identitas tertentu bisa membangkitkan kemarahan, ketakutan, dan kebencian. Ketika informasi seperti ini dibagikan berulang-ulang, ia menciptakan persepsi yang tampak nyata, meski tidak berbasis fakta.

Fragmentasi Solidaritas

Salah satu dampak jangka panjang dari politik identitas yang ekstrem adalah melemahnya solidaritas lintas kelompok. Ketika orang hanya peduli pada kelompoknya sendiri, kesediaan untuk berempati dan bekerja sama dengan pihak lain berkurang. Proyek-proyek kolektif yang membutuhkan konsensus dan gotong royong—seperti demokrasi, keadilan sosial, dan penanggulangan krisis iklim—terancam stagnan karena tidak ada titik temu.

Dalam banyak kasus, pembentukan koalisi antar kelompok menjadi semakin sulit karena adanya kecurigaan dan luka sejarah yang terus diperkuat oleh narasi di media sosial. Fragmentasi ini melemahkan posisi rakyat secara keseluruhan dalam menghadapi kekuatan ekonomi dan politik yang lebih besar.

Identitas Digital dan Performa Sosial

Media sosial juga mengubah cara orang menampilkan identitasnya. Di dunia digital, identitas bisa dikonstruksi, dipilih, dan disesuaikan. Seseorang bisa memilih menjadi aktivis lingkungan, pejuang hak minoritas, atau nasionalis konservatif tergantung pada komunitas daring yang diikutinya.

Namun, seringkali performa ini lebih bersifat simbolik daripada substansial. Misalnya, seseorang mungkin mengunggah konten pro-feminisme, tetapi tetap melakukan kekerasan dalam hubungan pribadi. Fenomena ini sering disebut sebagai *virtue signaling*—menunjukkan moralitas di ruang publik tanpa keterlibatan nyata. Identitas menjadi komoditas sosial, bukan landasan perubahan.

Peran Influencer dan Politisi

Para influencer dan politisi memainkan peran penting dalam dinamika ini. Mereka memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik dan memobilisasi dukungan. Sayangnya, banyak yang memilih menggunakan identitas sebagai alat mobilisasi tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya.

Kita melihat bagaimana politisi mengangkat isu SARA demi mendapatkan suara. Kita juga melihat influencer yang dengan sengaja menciptakan kontroversi untuk memperbesar engagement. Dalam lingkungan yang mengutamakan perhatian daripada kebenaran, motif-motif ini sangat merusak.

Resistensi dan Ruang Alternatif

Meskipun situasi terlihat gelap, banyak juga upaya resistensi terhadap polarisasi. Beberapa kelompok masyarakat sipil, jurnalis independen, dan komunitas online mencoba membangun ruang dialog yang lebih sehat. Mereka menggunakan media sosial untuk menyebarkan edukasi, meluruskan informasi, dan mendorong empati lintas identitas.

Program-program literasi digital, diskusi daring lintas kelompok, serta platform yang menolak algoritma berbasis keterlibatan semata adalah contoh upaya membangun ruang publik yang lebih inklusif. Generasi muda, sebagai pengguna media sosial paling aktif, memiliki potensi besar untuk mendorong perubahan ini jika diberdayakan dengan baik.

Perlu Ada Kebijakan dan Etika Digital

Negara dan masyarakat perlu merespons tantangan ini dengan serius. Regulasi terhadap penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan manipulasi algoritma adalah keharusan. Namun, regulasi saja tidak cukup. Diperlukan juga pengembangan etika digital—kesadaran kolektif tentang bagaimana berinteraksi secara sehat di ruang maya.

Pendidikan digital harus dimasukkan ke dalam kurikulum sejak dini, bukan hanya soal cara menggunakan teknologi, tetapi juga memahami dampaknya terhadap diri, orang lain, dan masyarakat luas. Kita harus belajar membedakan antara kritik dan kebencian, antara perbedaan dan permusuhan.

Refleksi: Siapa Kita di Dunia Digital?

Akhirnya, kita perlu merenung: siapa kita ketika berada di dunia digital? Apakah kita sekadar gema dari kelompok kita, atau individu yang mampu berpikir kritis dan membangun jembatan antar manusia? Politik identitas dan media sosial tidak harus selalu destruktif. Jika digunakan dengan bijak, keduanya bisa menjadi alat untuk membangun solidaritas baru yang lebih adil, setara, dan inklusif.

Namun itu hanya mungkin jika kita sebagai pengguna aktif memilih untuk tidak terjebak dalam siklus kebencian dan ketakutan. Kita harus berani menantang narasi yang menyederhanakan dunia menjadi hitam-putih. Kita harus berani membuka dialog, bahkan ketika itu tidak nyaman. Karena pada akhirnya, masa depan demokrasi digital sangat bergantung pada keputusan kita hari ini.

Berikut adalah **lanjutan narasi 2000 kata** dari topik "**Politik Identitas dan Polaritas Sosial di Era Media Sosial**", melanjutkan pembahasan sebelumnya dengan lebih mendalam dan analitis:

Politik Identitas dan Polaritas Sosial di Era Media Sosial (Bagian 2)

Demokrasi dalam Tekanan

Demokrasi idealnya bertumpu pada kebebasan berekspresi, pluralisme, dan partisipasi publik. Namun, di era media sosial yang penuh dengan konflik identitas dan polarisasi, prinsip-prinsip ini tertekan dari berbagai arah. Di satu sisi, media sosial membuka ruang bagi siapa pun untuk bersuara, termasuk kelompok minoritas yang sebelumnya terpinggirkan. Tapi di sisi lain, banjir informasi tanpa filter membuat batas antara ekspresi, provokasi, dan manipulasi menjadi kabur.

Demokrasi mengalami *overload* informasi tanpa jaminan kualitas. Wacana politik berubah menjadi ajang viralitas dan emosi, bukan rasionalitas. Politikus yang mengandalkan sensasi dan simbol identitas jauh lebih mudah meraih perhatian dibandingkan mereka yang menawarkan solusi teknokratis. Dalam kondisi ini, demokrasi berjalan pincang—bukan karena tak ada suara rakyat, tapi karena suaranya saling menenggelamkan dan menajamkan perpecahan.

Perang Narasi dan Penguasaan Simbol

Di era media sosial, kekuasaan politik sangat bergantung pada penguasaan narasi. Simbol identitas seperti bendera, lagu perjuangan, atau kutipan agama, menjadi alat legitimasi. Siapa yang menguasai simbol, bisa mengklaim "wakil sah" dari identitas tertentu. Hal ini tampak jelas dalam banyak konflik politik dan sosial, di mana kelompok-

kelompok saling mengklaim sebagai penjaga "jati diri bangsa", "iman yang benar", atau "budaya asli".

Dalam logika ini, yang terjadi bukan hanya adu ide, melainkan perang narasi. Lawan bukan hanya dianggap salah, tapi juga sesat, berbahaya, atau penghianat. Identitas berubah menjadi benteng, dan politik menjadi medan perang simbolik. Bendera bukan lagi sekadar simbol negara, tapi menjadi alat untuk mengeksklusi lawan. Agama tidak lagi menjadi pedoman spiritual, tapi senjata politik.

Komodifikasi Identitas

Identitas bukan lagi sekadar kenyataan sosial, tapi juga komoditas yang bisa dijual, dibentuk, dan dimanipulasi. Di media sosial, identitas dipaketkan dalam bentuk persona digital yang bisa dijual kepada pengiklan, digunakan dalam kampanye politik, atau ditukar dengan pengaruh sosial (*influence*). Perusahaan teknologi seperti Meta dan Google memonetisasi preferensi identitas pengguna dengan sangat efisien.

Politik identitas pun masuk ke ranah industri. Influencer yang berbicara tentang isu-isu sensitif seperti gender, agama, dan nasionalisme bisa dengan cepat menarik massa, membentuk komunitas, dan bahkan menjual produk. Perjuangan identitas berisiko tergelincir menjadi brand—di mana yang penting bukan keadilan sosial, tapi keterlibatan (*engagement*), views, dan follower count.

Ketegangan Global dan Konektivitas Lokal

Yang menarik, polarisasi berbasis identitas ini bukan hanya terjadi di tingkat lokal atau nasional. Konflik dan solidaritas identitas kini berskala global. Isu Palestina, Black Lives Matter, LGBTQ+, feminisme, dan Islamofobia menjadi bagian dari narasi lintas negara. Media sosial memungkinkan seseorang di Jakarta untuk merasa terlibat dalam protes di AS atau konflik di Gaza secara instan.

Namun, konektivitas global ini sering kali tidak disertai pemahaman konteks lokal. Orang membawa narasi global ke dalam konteks lokal tanpa filter, dan itu bisa menimbulkan kesalahpahaman atau konflik baru. Misalnya, membawa isu rasisme AS ke dalam perdebatan politik Indonesia bisa mengaburkan persoalan struktural lokal yang berbeda. Akibatnya, solidaritas yang terbentuk bisa menjadi semu atau kontraproduktif.

Radikalisasi dan Konservatisme Digital

Media sosial juga menjadi ruang berkembangnya radikalisasi—baik dari sisi ekstrem kanan, ekstrem kiri, maupun agama. Platform-platform ini memudahkan penyebaran konten ideologis yang ekstrem, menarik orang-orang yang merasa tersisih, marah, atau bingung. Algoritma yang menampilkan konten serupa terus-menerus memperkuat radikalisasi ini.

Di sisi lain, konservatisme juga menemukan panggung baru. Banyak komunitas daring yang mengangkat identitas budaya atau agama sebagai respons terhadap modernitas dan globalisasi yang dianggap mengancam nilai tradisional. Konservatisme digital ini bisa bersifat sehat ketika mendorong refleksi nilai, tetapi bisa juga menjadi eksklusif dan menolak dialog, terutama bila dibalut semangat anti-kritik dan narsisme kelompok.

Bahasa sebagai Arena Konflik

Bahasa di media sosial sangat penting—ia bukan hanya medium, tapi juga arena konflik. Kata-kata seperti “kafir”, “radikal”, “buzzer”, “SJW”, “liberal”, atau “kadrun” tidak hanya menjelaskan posisi, tapi juga menyerang lawan. Bahasa digunakan untuk menandai batas, membentuk identitas, dan mengontrol narasi.

Hal ini menciptakan iklim di mana diskusi sehat menjadi sulit. Setiap kata bisa dianggap serangan. Setiap kritik bisa dianggap permusuhan. Dalam lingkungan semacam ini, hanya dua pilihan yang tersedia: menyerang

atau diam. Nuansa, keraguan, dan keterbukaan—yang seharusnya menjadi kekuatan intelektual—malah dianggap kelemahan.

Resistensi melalui Humor dan Seni

Menariknya, salah satu cara paling ampuh melawan polarisasi adalah melalui humor dan seni. Banyak seniman, komedian, dan kreator konten yang menggunakan ironi, satire, dan kreativitas untuk membuka ruang dialog yang tidak menggurui. Humor bisa menembus batas identitas, meruntuhkan ego kelompok, dan memperlihatkan absurditas polarisasi.

Seni visual, musik, film pendek, dan konten kreatif lainnya bisa menyampaikan pesan-pesan penting tanpa memicu defensif. Ketika argumen rasional gagal menembus tembok identitas, seni sering kali menjadi jembatan yang lebih efektif. Ini adalah ruang yang perlu terus didukung dan dikembangkan sebagai alternatif dari wacana bising yang kini mendominasi.

Kejenuhan Kolektif dan Fatigue Sosial

Fenomena lain yang mulai tampak adalah munculnya kejenuhan kolektif terhadap konflik identitas. Banyak pengguna media sosial merasa lelah secara emosional karena terus-menerus disuguhi konflik, kemarahan, dan pertengkaran. Hal ini menciptakan kondisi *fatigue sosial*, di mana orang menjadi apatis atau menarik diri dari ruang publik digital.

Sikap ini, meskipun bisa dimengerti, justru berbahaya dalam jangka panjang. Ketika warga yang rasional dan moderat mundur, ruang digital dikuasai oleh kelompok ekstrem yang lebih vokal. Polarisasi pun semakin dalam karena tidak ada penyeimbang. Oleh karena itu, penting untuk menemukan cara berpartisipasi yang sehat dan berkelanjutan dalam ruang digital.

Menuju Politik Identitas yang Konstruktif

Meskipun politik identitas sering dikritik karena memecah belah, ia tetap memiliki potensi besar jika diarahkan secara konstruktif. Identitas bisa

menjadi sumber kekuatan kolektif untuk menuntut kesetaraan, keadilan, dan pengakuan. Namun, ini hanya mungkin jika identitas tidak dikunci dalam eksklusivitas, melainkan dibuka untuk kolaborasi.

Misalnya, gerakan perempuan bisa bekerja sama dengan gerakan lingkungan karena ada irisan kepentingan. Komunitas agama bisa berkolaborasi dengan komunitas minoritas dalam isu kemanusiaan. Politik identitas yang terbuka dan lintas batas bisa menciptakan solidaritas baru yang lebih luas dan inklusif. Media sosial harus diarahkan untuk memfasilitasi hal ini, bukan sebaliknya.

Literasi Identitas dan Empati Digital

Solusi jangka panjang dari masalah ini adalah pendidikan, terutama literasi identitas dan empati digital. Orang harus belajar mengenali konstruksi identitasnya sendiri, memahami identitas orang lain, dan menyadari bagaimana media memengaruhi persepsi mereka. Literasi semacam ini harus diajarkan sejak dini, tidak hanya di sekolah tetapi juga di komunitas.

Empati digital berarti belajar melihat manusia di balik akun. Mengingat bahwa setiap orang membawa luka, sejarah, dan perjuangannya sendiri. Bahwa tidak semua perbedaan adalah ancaman, dan tidak semua kritik adalah serangan. Ketika empati hadir, maka dialog dimungkinkan. Dan hanya melalui dialog, demokrasi bisa diselamatkan dari jurang polarisasi.

Penutup

Politik identitas dan polaritas sosial bukanlah hal yang bisa dihindari di era media sosial. Keduanya adalah produk dari dinamika modernitas yang kompleks—di mana teknologi, psikologi massa, dan sejarah kolektif bertemu dalam satu ruang digital yang padat dan tidak stabil.

Namun, tantangan ini bukan akhir cerita. Justru ini menjadi panggilan bagi masyarakat untuk membangun ruang publik digital yang lebih

Rudy C Tarumingkeng: **Politik Identitas dan Polaritas Sosial di Era Media Sosial**

sehat, adil, dan terbuka. Media sosial bisa menjadi alat pembebasan atau penindasan, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Identitas bisa menjadi jembatan atau tembok, tergantung bagaimana kita memaknainya.

Di tengah kebisingan algoritma dan badai informasi, kita perlu kembali bertanya: untuk apa kita berpolitik? Untuk siapa kita bersuara? Dan bagaimana cara kita menjaga kemanusiaan di era yang semakin terfragmentasi?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan arah masa depan demokrasi, solidaritas, dan identitas kita sebagai warga dunia digital.

Berikut bagian **Refleksi dan Diskusi** dari topik "*Politik Identitas dan Polaritas Sosial di Era Media Sosial*". Bagian ini mengajak pembaca berpikir lebih kritis dan merenungkan posisi mereka dalam dinamika yang terjadi, sekaligus menawarkan ruang diskusi konstruktif.

Refleksi: Kita Siapa, dan Mau ke Mana?

Ketika dunia digital menjadi perpanjangan dari kehidupan nyata, identitas kita pun ikut terdigitalisasi. Kita bukan hanya manusia yang memiliki keyakinan, nilai, dan sejarah—kita juga menjadi representasi dari klik, unggahan, dan algoritma. Dalam situasi ini, penting untuk bertanya:

- **Apakah saya berbicara sebagai diri sendiri atau sebagai bagian dari kelompok yang ingin "menang"?**
- **Apakah saya berbagi karena percaya pada nilai yang saya anut, atau karena ingin validasi sosial?**
- **Apakah saya mengkritik untuk mencari kebenaran, atau untuk menjatuhkan pihak lain?**

Refleksi semacam ini penting untuk menahan diri dari menjadi agen polarisasi. Tidak mudah. Karena media sosial dirancang untuk menstimulasi impuls, bukan untuk mendorong perenungan. Tapi justru karena itu, kesadaran kritis harus dibangun.

Kita juga harus menyadari bahwa identitas bukan sesuatu yang tunggal. Seseorang bisa jadi seorang muslim, perempuan, aktivis lingkungan, dan juga penggemar budaya pop Korea dalam waktu yang bersamaan. Manusia kompleks. Ketika kita menyederhanakan orang lain menjadi "kubu lawan", kita sedang menyangkal kemanusiaan mereka—dan juga kemanusiaan kita sendiri.

Refleksi ini penting bukan hanya untuk individu, tetapi juga untuk komunitas, organisasi, dan negara. Apakah institusi kita memperkuat ruang diskusi yang sehat? Apakah media kita lebih tertarik pada sensasi daripada pemahaman? Apakah sistem pendidikan kita mengajarkan berpikir kritis atau hanya menghafal posisi ideologis?

Jika jawaban-jawaban ini cenderung negatif, maka kita perlu perubahan besar—baik dalam cara berpikir maupun dalam struktur sosial yang kita bentuk bersama.

Diskusi: Menemukan Jalan Tengah di Era Polarisasi

Berikut adalah beberapa pertanyaan kunci yang bisa digunakan dalam ruang diskusi, kelas, komunitas, atau forum publik untuk membedah isu ini secara kritis namun konstruktif:

1. Apakah politik identitas selalu buruk?

Diskusikan kapan politik identitas berfungsi sebagai alat pembebasan (misalnya dalam perjuangan hak asasi) dan kapan ia berubah menjadi alat eksklusif dan pemecah belah.

2. Bagaimana cara menjaga ekspresi identitas tanpa menjatuhkan identitas orang lain?

Bicara tentang pentingnya dialog, etika berkomunikasi, dan membangun jembatan antar kelompok.

3. Apa peran media sosial dalam memperkuat atau meredam konflik identitas?

Analisis bagaimana algoritma bekerja, serta apa yang bisa dilakukan oleh platform dan pengguna.

4. Apakah kita terlalu mengandalkan identitas dalam membangun solidaritas?

Diskusikan apakah solidaritas harus selalu berbasis pada kesamaan identitas, atau bisa dibangun atas dasar nilai bersama seperti keadilan, kemanusiaan, dan kebebasan.

5. Bagaimana membangun ruang digital yang memungkinkan ketidaksepakatan tanpa kebencian?

Bahas tentang pentingnya moderasi konten, peran literasi digital, serta membudayakan debat sehat.

6. Bagaimana kita menyikapi perbedaan generasi dalam memahami politik identitas?

Generasi tua dan muda sering punya cara berbeda dalam merespons isu identitas. Diskusi ini bisa menjembatani gap dan membangun empati antargenerasi.

Kesimpulan Reflektif

Politik identitas dan polarisasi sosial tidak akan hilang dalam waktu dekat. Tapi keduanya bisa dikelola. Mereka bisa diarahkan ke bentuk yang lebih produktif—asal ada kesadaran, komitmen, dan ruang dialog yang terus diperluas.

Tugas kita bukan menyalahkan media sosial, identitas, atau pihak lain semata. Tapi juga menata ulang cara kita berpartisipasi sebagai warga digital. Menjadi warga digital yang cerdas berarti mampu membedakan informasi dari propaganda, perbedaan dari permusuhan, dan keberanian dari kebencian.

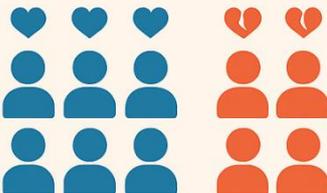
Karena di ujungnya, demokrasi—baik digital maupun nyata—bertumpu pada satu hal yang sangat sederhana namun sangat penting: kemampuan untuk hidup bersama meskipun berbeda.

ALGORITMA DAN POLARISASI SOSIAL



ECHO CHAMBERS

Algoritma cenderung menyajikan konten yang sesuai dengan pandangan pengguna



MENAJAMKAN PERBEDAAN

Konten provokatif yang memicu emosi diperlihatkan lebih sering

DESAIN UNTUK KETERLIBATAN

Algoritma dimaksudkan untuk mempertahankan perhatian



MEMPERDALAM POLARISASI

Pendekatan algoritmik ini memperdalam polarisasi di dalam masyarakat



Pendekatan algoritmik ini memperdalam polarisasi

Berikut adalah **glosarium** untuk istilah-istilah penting dalam topik "**Politik Identitas dan Polaritas Sosial di Era Media Sosial**". Glosarium ini berguna untuk memperjelas konsep-konsep kunci dalam diskusi:

Glosarium

1. Politik Identitas

Praktik politik yang berfokus pada kepentingan dan perjuangan kelompok berdasarkan identitas seperti ras, agama, etnisitas, gender, orientasi seksual, atau budaya tertentu.

2. Polaritas Sosial

Kondisi terbelahnya masyarakat ke dalam dua (atau lebih) kelompok yang berseberangan secara ideologis, identitas, atau pandangan politik, seringkali dengan ketegangan dan konflik.

3. Media Sosial

Platform digital yang memungkinkan individu untuk berbagi informasi, berkomunikasi, dan membentuk komunitas secara daring. Contoh: Facebook, X (Twitter), Instagram, TikTok.

4. Algoritma

Rangkaian perintah otomatis yang digunakan platform digital untuk mengatur dan merekomendasikan konten kepada pengguna berdasarkan preferensi dan perilaku mereka.

5. Echo Chamber

Lingkungan digital di mana seseorang hanya terpapar pada pandangan yang sejalan dengan pandangan mereka sendiri, sehingga memperkuat keyakinan tanpa tantangan dari perspektif berbeda.

6. Filter Bubble

Kondisi di mana algoritma secara tidak sadar menyaring informasi yang masuk kepada pengguna, menyebabkan keterbatasan pandangan dan membatasi keberagaman informasi.

7. Ujaran Kebencian (Hate Speech)

Pernyataan atau ekspresi yang menyerang atau merendahkan individu atau kelompok berdasarkan ras, agama, etnis, gender, atau identitas lainnya.

8. Disinformasi

Informasi yang sengaja disebar untuk menyesatkan, biasanya untuk keuntungan politik, finansial, atau ideologis.

9. Virtue Signaling

Perilaku di mana seseorang menampilkan sikap moral atau keadilan sosial secara publik (misalnya lewat media sosial) bukan karena komitmen nyata, melainkan demi citra atau penerimaan sosial.

10. Radikalisasi Digital

Proses di mana individu menjadi semakin ekstrem dalam pandangan politik, ideologis, atau keagamaannya akibat paparan konten digital yang terus menerus dan bersifat menghasut.

11. Komodifikasi Identitas

Proses menjadikan identitas sebagai produk yang bisa dijual, dipromosikan, atau digunakan untuk keuntungan ekonomi dan politik di ruang digital.

12. Solidaritas Lintas Identitas

Bentuk kerja sama antara kelompok dengan latar belakang identitas berbeda berdasarkan nilai atau tujuan bersama seperti keadilan sosial atau kemanusiaan.

13. Fatigue Sosial

Kelelahan emosional dan mental akibat paparan terus-menerus terhadap konflik sosial, perdebatan politik, atau drama digital di media sosial.

14. Empati Digital

Kemampuan untuk memahami dan merasakan perspektif serta emosi orang lain dalam interaksi di ruang digital, termasuk saat berbeda pendapat.

15. Moderasi Konten

Upaya sistematis untuk mengawasi, menyaring, dan menghapus konten yang melanggar aturan komunitas atau menyebarkan kebencian dan disinformasi.

16. Identitas Kolektif

Rasa kesamaan dan keterikatan yang dirasakan oleh anggota suatu kelompok berdasarkan pengalaman, nilai, dan simbol yang sama.

17. Politik Emosional

Strategi politik yang menitikberatkan pada emosi—seperti ketakutan, kemarahan, atau kebanggaan—untuk menarik dukungan, bukan melalui logika atau kebijakan rasional.

18. Performa Sosial

Cara seseorang menampilkan diri di ruang publik atau media sosial untuk menciptakan citra tertentu yang sesuai dengan nilai kelompok atau ekspektasi sosial.

19. Demokrasi Digital

Konsep demokrasi yang mencakup penggunaan teknologi informasi, terutama media sosial, untuk partisipasi publik dalam diskusi, pemilihan, dan pengambilan keputusan.

20. Literasi Digital

Rudy C Tarumingkeng: **Politik Identitas dan Polaritas Sosial
di Era Media Sosial**

Kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dari media digital secara kritis dan etis.

Berikut adalah **Daftar Pustaka** yang relevan dan dapat digunakan untuk mendukung penulisan dan pengkajian lebih lanjut terkait topik "*Politik Identitas dan Polaritas Sosial di Era Media Sosial*". Daftar ini mencakup buku, artikel ilmiah, laporan riset, dan sumber digital terpercaya:

Daftar Pustaka

Buku dan Artikel Akademik

1. **Mouffe, Chantal.** *The Democratic Paradox*. London: Verso, 2000.
– Membahas politik identitas dalam konteks demokrasi pluralistik.
2. **Castells, Manuel.** *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*. Cambridge: Polity Press, 2012.
– Menjelaskan pengaruh media digital terhadap mobilisasi sosial dan identitas kolektif.
3. **Nakamura, Lisa.** *Digitizing Race: Visual Cultures of the Internet*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008.
– Kajian tentang identitas rasial di dunia digital.
4. **Sunstein, Cass R.** *#Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media*. Princeton University Press, 2017.
– Analisis dampak media sosial terhadap demokrasi dan pembentukan echo chamber.
5. **Kellner, Douglas.** *Media Spectacle and the Crisis of Democracy*. Routledge, 2018.
– Mengkaji bagaimana media spektakuler dan identitas memengaruhi wacana publik dan demokrasi.
6. **Fraser, Nancy.** "From Redistribution to Recognition? Dilemmas of Justice in a 'Post-Socialist' Age." *New Left Review*, No. 212, 1995.

Rudy C Tarumingkeng: **Politik Identitas dan Polaritas Sosial di Era Media Sosial**

– Kritik terhadap politik identitas dan usulan alternatif dalam kerangka keadilan sosial.

7. **Tufekci, Zeynep.** *Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest.* Yale University Press, 2017.

– Studi tentang dinamika pergerakan sosial di era media sosial.

Jurnal dan Laporan Riset

8. **Bail, Christopher A., et al.** (2018). "Exposure to opposing views on social media can increase political polarization." *PNAS*, 115(37), 9216–9221.

– Penelitian empiris tentang dampak interaksi lintas pandangan di media sosial.

9. **Pew Research Center.** (2020). *Americans and Social Media: Usage and Attitudes.*

– Laporan statistik dan tren penggunaan media sosial dalam konteks politik di AS.

<https://www.pewresearch.org>

10. **UNESCO.** (2021). *Addressing Hate Speech through Education.*

– Panduan global untuk menghadapi ujaran kebencian, termasuk di platform digital.

<https://unesdoc.unesco.org>

11. **Kominfo RI.** (2023). *Laporan Tahunan Literasi Digital Indonesia.*

– Data dan temuan mengenai tingkat literasi digital dan penyebaran hoaks.

<https://www.kominfo.go.id>

Sumber Online dan Media

12. **The Conversation Indonesia.** (2020–2024). Artikel-artikel tentang politik identitas, media sosial, dan demokrasi.
<https://theconversation.com/id>
13. **New Naratif.** (2019). *Explainers: Identity Politics in Southeast Asia.*
– Penjelasan konteks sejarah dan budaya politik identitas di Asia Tenggara.
<https://newnaratif.com>
14. **Aliansi Jurnalis Independen (AJI).** (2022). *Panduan Peliputan Isu Identitas dan Minoritas.*
– Pedoman jurnalisme yang sensitif terhadap keberagaman.
15. **Google Jigsaw & Moonshot CVE.** (2021). *Redirect Method: Countering Online Extremism.*
– Pendekatan berbasis algoritma untuk menangkal radikalisasi daring.

Copilot for this article: **ChatGPT 4o (2025)**. Access date: 3 August 2025.
Author's <https://chatgpt.com/g/g-B3hgivKK9-write-for-me/c/688f38ab-6770-832b-b714-44150d8fa3d0>